

Judul : Jangan ulang masa lalu: Reformasi Polri kudu diperkuat
Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Jangan Ulang Masa Lalu **Reformasi Polri Kudu Diperkuat**

ANGGOTA Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti wacana penempatan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri dan kemunduran dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara.

Padahal, Polri sudah dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 2000 dan Kemendagri tahun 1946. Pemisahan itu bertujuan menjadikan institusi Polri sebagai lembaga yang mandiri dan profesional.

“Mereka (Polri) sudah pernah di bawah Kemendagri, juga pernah bareng dengan TNI. Jadi, kita tidak perlu kita mengulang masa lalu yang kurang baik,” papar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS ini.

Soal dugaan keterlibatan oknum Polri di kontestasi Pilkada 2024, Aboe menyarankan adanya evaluasi atas dugaan tersebut. Namun, menempatkan Polri di bawah kementerian bukan solusi atas persoalan tersebut.

“Kalau ada persoalan terkait netralitas dan profesionalitas Polri, utamanya dalam pelaksanaan Pilkada, fokusnya evaluasi dan pembenahan. Kita harus memperkuat akuntabilitas, pengawasan dan kapasitas internal Polri,” cetusnya.

Dia menambahkan, jika ada



Habib Aboe Bakar Alhabsyi oknum anggota polri yang berpolitik, lalu mewacanakan memposisikan Polri di bawah Kemendagri, justru berpotensi melahirkan masalah baru. Sebab, wacana itu berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar.

Aboe mengajak semua pihak menjaga semangat reformasi Polri, serta tidak mengambil langkah mundur yang dapat mengganggu stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

“Polri adalah institusi negara, bukan alat Pemerintahan tertentu. Reformasi Polri harus terus diperkuat, bukan diputarbalikkan ke masa lalu,” tandas Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu. ■ **ONI**